



SALINAN

**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 12 TAHUN 2016**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, telah ditetapkan Peraturan Bupati Balangan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Bupati Balangan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran

Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2015 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2016.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Balangan;
2. Bupati adalah Bupati Balangan;
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Jumlah Desa adalah jumlah desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

**BAB II
RINCIAN DANA DESA**

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2016.
- (2) Rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa.

Pasal 4

Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden tentang Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

Pasal 5

Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DDkab - ADkab)$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk desa Nasional.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin desa Nasional.

Z3 = rasio luas wilayah desa setiap Desa terhadap total luas wilayah desa Nasional.

Z4 = rasio IKG kabupaten terhadap total IKG Kabupaten/kota yang memiliki Desa.

DDkab = pagu Dana Desa Kabupaten.

ADkab = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b menggunakan IKG Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.

- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. peraturan Desa mengenai APB Desa kepada Bupati Cq. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Balangan dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan.
 - b. Evaluasi rancangan APBDes oleh Camat dengan Surat Keputusan Camat.
 - c. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
 - d. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa, Surat Keputusan Camat, dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, b, dan c kepada Bupati Cq. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Balangan dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan paling lambat minggu kedua bulan Februari.
- (5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I kepada Bupati Cq. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Balangan dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan.
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (limapuluh per seratus).
 - c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati Cq. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Balangan dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- (6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 9

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 10

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 11

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati Cq. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Balangan dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 13

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.

- (5) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 18 April 2016

BUPATI BALANGAN,

Ttd

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 18 April 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

Ttd

H. RUSKARIADI

MENGETAKUI
SALINAN FOTOCOPY SESUI DENGAN ASLINYA
PIK. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN BALANGAN,

HASAN NOR ARIFIN, SH
NIP. 19711110 200604 1 008

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 12 TAHUN 2016
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
 SETIAP DESA DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2016

**BESARAN DANA PER DESA YANG BERSUMBER DARI APBN DI KABUPATEN BALANGAN
 TAHUN ANGGARAN 2016**

| NO. | KECAMATAN | DESA | DANA DESA | TAHAP I | TAHAP II |
|-----|-----------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | JUAI | MUARA NINIAN | Rp 591.905.000 | Rp 355.143.000 | Rp 236.762.000 |
| 2 | JUAI | HAMARUNG | Rp 598.448.000 | Rp 359.068.800 | Rp 239.379.200 |
| 3 | JUAI | JUAI | Rp 590.175.000 | Rp 354.105.000 | Rp 236.070.000 |
| 4 | JUAI | BUNTU KARAU | Rp 601.511.000 | Rp 360.906.600 | Rp 240.604.400 |
| 5 | JUAI | BATA | Rp 590.103.000 | Rp 354.061.800 | Rp 236.041.200 |
| 6 | JUAI | GALUMBANG | Rp 592.750.000 | Rp 355.650.000 | Rp 237.100.000 |
| 7 | JUAI | SUNGAI BATUNG | Rp 595.105.000 | Rp 357.063.000 | Rp 238.042.000 |
| 8 | JUAI | SIRAP | Rp 594.721.000 | Rp 356.832.600 | Rp 237.888.400 |
| 9 | JUAI | TIGARUN | Rp 591.338.000 | Rp 354.802.800 | Rp 236.535.200 |
| 10 | JUAI | TELUK BAYUR | Rp 600.003.000 | Rp 360.001.800 | Rp 240.001.200 |
| 11 | JUAI | PAMURUS | Rp 591.312.000 | Rp 354.787.200 | Rp 236.524.800 |
| 12 | JUAI | MARIAS | Rp 593.730.000 | Rp 356.238.000 | Rp 237.492.000 |
| 13 | JUAI | LALAYAU | Rp 613.401.000 | Rp 368.040.600 | Rp 245.360.400 |
| 14 | JUAI | MIHU | Rp 608.186.000 | Rp 364.911.600 | Rp 243.274.400 |
| 15 | JUAI | HUKAI | Rp 593.144.000 | Rp 355.886.400 | Rp 237.257.600 |
| 16 | JUAI | TAWAHAN | Rp 609.111.000 | Rp 365.466.600 | Rp 243.644.400 |
| 17 | JUAI | GULINGGANG | Rp 595.128.000 | Rp 357.076.800 | Rp 238.051.200 |
| 18 | JUAI | MUNGKUR UYAM | Rp 594.451.000 | Rp 356.670.600 | Rp 237.780.400 |
| 19 | JUAI | PANIMBAAN | Rp 587.135.000 | Rp 352.281.000 | Rp 234.854.000 |

| | | | | | | | | |
|----|--------|-------------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|
| 20 | JUAI | WONOREJO | Rp | 604.251.000 | Rp | 362.550.600 | Rp | 241.700.400 |
| 21 | JUAI | SUMBER REJEKI | Rp | 611.671.000 | Rp | 367.002.600 | Rp | 244.668.400 |
| 22 | HALONG | HAUWAI | Rp | 626.808.000 | Rp | 376.084.800 | Rp | 250.723.200 |
| 23 | HALONG | BANGKAL | Rp | 595.763.000 | Rp | 357.457.800 | Rp | 238.305.200 |
| 24 | HALONG | MANTUYAN | Rp | 611.912.000 | Rp | 367.147.200 | Rp | 244.764.800 |
| 25 | HALONG | TABUAN | Rp | 599.615.000 | Rp | 359.769.000 | Rp | 239.846.000 |
| 26 | HALONG | HALONG | Rp | 609.235.000 | Rp | 365.541.000 | Rp | 243.694.000 |
| 27 | HALONG | PUYUN | Rp | 592.748.000 | Rp | 355.648.800 | Rp | 237.099.200 |
| 28 | HALONG | BUNTU PILANDUK | Rp | 593.686.000 | Rp | 356.211.600 | Rp | 237.474.400 |
| 29 | HALONG | GUNUNG RIUT | Rp | 596.377.000 | Rp | 357.826.200 | Rp | 238.550.800 |
| 30 | HALONG | KAPUL | Rp | 602.982.000 | Rp | 361.789.200 | Rp | 241.192.800 |
| 31 | HALONG | MAMANTANG | Rp | 616.359.000 | Rp | 369.815.400 | Rp | 246.543.600 |
| 32 | HALONG | BINJAI PUNGGAL | Rp | 604.539.000 | Rp | 362.723.400 | Rp | 241.815.600 |
| 33 | HALONG | LIYU | Rp | 593.361.000 | Rp | 356.016.600 | Rp | 237.344.400 |
| 34 | HALONG | BINUANG SANTANG | Rp | 647.550.000 | Rp | 388.530.000 | Rp | 259.020.000 |
| 35 | HALONG | ANIUNGAN | Rp | 611.725.000 | Rp | 367.035.000 | Rp | 244.690.000 |
| 36 | HALONG | BINJU | Rp | 588.794.000 | Rp | 353.276.400 | Rp | 235.517.600 |
| 37 | HALONG | KARYA | Rp | 596.023.000 | Rp | 357.613.800 | Rp | 238.409.200 |
| 38 | HALONG | UREN | Rp | 620.670.000 | Rp | 372.402.000 | Rp | 248.268.000 |
| 39 | HALONG | MARAJAI | Rp | 611.672.000 | Rp | 367.003.200 | Rp | 244.668.800 |
| 40 | HALONG | SURYATAMA | Rp | 591.085.000 | Rp | 354.651.000 | Rp | 236.434.000 |
| 41 | HALONG | BARUH PANYAMBARAN | Rp | 601.050.000 | Rp | 360.630.000 | Rp | 240.420.000 |
| 42 | HALONG | MAUYA | Rp | 598.723.000 | Rp | 359.233.800 | Rp | 239.489.200 |
| 43 | HALONG | PADANG RAYA | Rp | 603.939.000 | Rp | 362.363.400 | Rp | 241.575.600 |
| 44 | HALONG | SUMBER AGUNG | Rp | 593.479.000 | Rp | 356.087.400 | Rp | 237.391.600 |
| 45 | HALONG | MAMIGANG | Rp | 632.014.000 | Rp | 379.208.400 | Rp | 252.805.600 |
| 46 | AWAYAN | BIHARA | Rp | 594.061.000 | Rp | 356.436.600 | Rp | 237.624.400 |
| 47 | AWAYAN | PEMATANG | Rp | 600.706.000 | Rp | 360.423.600 | Rp | 240.282.400 |
| 48 | AWAYAN | MERAH | Rp | 595.445.000 | Rp | 357.267.000 | Rp | 238.178.000 |
| 49 | AWAYAN | AWAYAN | Rp | 585.610.000 | Rp | 351.366.000 | Rp | 234.244.000 |
| 50 | AWAYAN | PUDAK | Rp | 588.499.000 | Rp | 353.099.400 | Rp | 235.399.600 |
| 51 | AWAYAN | BADALUNGGA | Rp | 607.386.000 | Rp | 364.431.600 | Rp | 242.954.400 |

| | | | | | | | | |
|----|------------|-------------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|
| 52 | AWAYAN | TUNDAKAN | Rp | 599.200.000 | Rp | 359.520.000 | Rp | 239.680.000 |
| 53 | AWAYAN | SIKONTAN | Rp | 590.291.000 | Rp | 354.174.600 | Rp | 236.116.400 |
| 54 | AWAYAN | PULANTAN | Rp | 588.050.000 | Rp | 352.830.000 | Rp | 235.220.000 |
| 55 | AWAYAN | TUNDI | Rp | 593.531.000 | Rp | 356.118.600 | Rp | 237.412.400 |
| 56 | AWAYAN | MUARA JAYA | Rp | 596.555.000 | Rp | 357.933.000 | Rp | 238.622.000 |
| 57 | AWAYAN | BIHARA HILIR | Rp | 595.095.000 | Rp | 357.057.000 | Rp | 238.038.000 |
| 58 | AWAYAN | BARU | Rp | 592.510.000 | Rp | 355.506.000 | Rp | 237.004.000 |
| 59 | AWAYAN | AWAYAN HILIR | Rp | 581.507.000 | Rp | 348.904.200 | Rp | 232.602.800 |
| 60 | AWAYAN | PUTAT BASIUN | Rp | 588.838.000 | Rp | 353.302.800 | Rp | 235.535.200 |
| 61 | AWAYAN | SEI PUMPUNG | Rp | 597.302.000 | Rp | 358.381.200 | Rp | 238.920.800 |
| 62 | AWAYAN | BADALUNGGGA HILIR | Rp | 588.180.000 | Rp | 352.908.000 | Rp | 235.272.000 |
| 63 | AWAYAN | NUNGKA | Rp | 596.657.000 | Rp | 357.994.200 | Rp | 238.662.800 |
| 64 | AWAYAN | TANGALIN | Rp | 608.779.000 | Rp | 365.267.400 | Rp | 243.511.600 |
| 65 | AWAYAN | KEDONDONG | Rp | 621.459.000 | Rp | 372.875.400 | Rp | 248.583.600 |
| 66 | AWAYAN | BARAMBAN | Rp | 589.403.000 | Rp | 353.641.800 | Rp | 235.761.200 |
| 67 | AWAYAN | AMBAKIANG | Rp | 595.691.000 | Rp | 357.414.600 | Rp | 238.276.400 |
| 68 | AWAYAN | PIYAIT | Rp | 588.450.000 | Rp | 353.070.000 | Rp | 235.380.000 |
| 69 | BATU MANDI | TARIWIN | Rp | 592.201.000 | Rp | 355.320.600 | Rp | 236.880.400 |
| 70 | BATU MANDI | LOK BATU | Rp | 595.988.000 | Rp | 357.592.800 | Rp | 238.395.200 |
| 71 | BATU MANDI | MUNJUNG | Rp | 614.576.000 | Rp | 368.745.600 | Rp | 245.830.400 |
| 72 | BATU MANDI | PELAJAU | Rp | 613.285.000 | Rp | 367.971.000 | Rp | 245.314.000 |
| 73 | BATU MANDI | BATUMANDI | Rp | 610.405.000 | Rp | 366.243.000 | Rp | 244.162.000 |
| 74 | BATU MANDI | RIWA | Rp | 613.325.000 | Rp | 367.995.000 | Rp | 245.330.000 |
| 75 | BATU MANDI | MANTIMIN | Rp | 597.455.000 | Rp | 358.473.000 | Rp | 238.982.000 |
| 76 | BATU MANDI | MAMPARI | Rp | 621.470.000 | Rp | 372.882.000 | Rp | 248.588.000 |
| 77 | BATU MANDI | BUNGUR | Rp | 593.189.000 | Rp | 355.913.400 | Rp | 237.275.600 |
| 78 | BATU MANDI | TELUK MESJID | Rp | 623.654.000 | Rp | 374.192.400 | Rp | 249.461.600 |
| 79 | BATU MANDI | TIMBUN TULANG | Rp | 605.519.000 | Rp | 363.311.400 | Rp | 242.207.600 |
| 80 | BATU MANDI | BANUA HANYAR | Rp | 611.379.000 | Rp | 366.827.400 | Rp | 244.551.600 |
| 81 | BATU MANDI | BAKUNG | Rp | 588.649.000 | Rp | 353.189.400 | Rp | 235.459.600 |
| 82 | BATU MANDI | KARUH | Rp | 615.917.000 | Rp | 369.550.200 | Rp | 246.366.800 |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|
| 83 | BATU MANDI | GUHA | Rp | 591.229.000 | Rp | 354.737.400 | Rp | 236.491.600 |
| 84 | BATU MANDI | GUNUNG MANAU | Rp | 593.686.000 | Rp | 356.211.600 | Rp | 237.474.400 |
| 85 | BATU MANDI | HAMPA RAYA | Rp | 596.405.000 | Rp | 357.843.000 | Rp | 238.562.000 |
| 86 | BATU MANDI | KASAI | Rp | 592.063.000 | Rp | 355.237.800 | Rp | 236.825.200 |
| 87 | LAMPIHONG | TANAH HABANG KIRI | Rp | 594.917.000 | Rp | 356.950.200 | Rp | 237.966.800 |
| 88 | LAMPIHONG | PANAITAN | Rp | 619.554.000 | Rp | 371.732.400 | Rp | 247.821.600 |
| 89 | LAMPIHONG | TANAH HABANG KANAN | Rp | 594.586.000 | Rp | 356.751.600 | Rp | 237.834.400 |
| 90 | LAMPIHONG | BATU MERAH | Rp | 617.685.000 | Rp | 370.611.000 | Rp | 247.074.000 |
| 91 | LAMPIHONG | LAMPIHONG KANAN | Rp | 587.844.000 | Rp | 352.706.400 | Rp | 235.137.600 |
| 92 | LAMPIHONG | LAMPIHONG SELATAN | Rp | 592.181.000 | Rp | 355.308.600 | Rp | 236.872.400 |
| 93 | LAMPIHONG | LAMPIHONG KIRI | Rp | 586.428.000 | Rp | 351.856.800 | Rp | 234.571.200 |
| 94 | LAMPIHONG | LAJAR | Rp | 618.784.000 | Rp | 371.270.400 | Rp | 247.513.600 |
| 95 | LAMPIHONG | KUSAMBI HULU | Rp | 598.200.000 | Rp | 358.920.000 | Rp | 239.280.000 |
| 96 | LAMPIHONG | KUSAMBI HILIR | Rp | 599.870.000 | Rp | 359.922.000 | Rp | 239.948.000 |
| 97 | LAMPIHONG | SIMPANG TIGA | Rp | 594.570.000 | Rp | 356.742.000 | Rp | 237.828.000 |
| 98 | LAMPIHONG | MATANG LURUS | Rp | 604.367.000 | Rp | 362.620.200 | Rp | 241.746.800 |
| 99 | LAMPIHONG | LOK HAMAWANG | Rp | 602.387.000 | Rp | 361.432.200 | Rp | 240.954.800 |
| 100 | LAMPIHONG | KUPANG | Rp | 588.951.000 | Rp | 353.370.600 | Rp | 235.580.400 |
| 101 | LAMPIHONG | TAMPANG | Rp | 593.698.000 | Rp | 356.218.800 | Rp | 237.479.200 |
| 102 | LAMPIHONG | MATANG HANAU | Rp | 600.034.000 | Rp | 360.020.400 | Rp | 240.013.600 |
| 103 | LAMPIHONG | LOK PANGINANGAN | Rp | 605.265.000 | Rp | 363.159.000 | Rp | 242.106.000 |
| 104 | LAMPIHONG | JUNGKAL | Rp | 591.676.000 | Rp | 355.005.600 | Rp | 236.670.400 |
| 105 | LAMPIHONG | SUNGAI TABUK | Rp | 586.114.000 | Rp | 351.668.400 | Rp | 234.445.600 |
| 106 | LAMPIHONG | JIMAMUN | Rp | 603.570.000 | Rp | 362.142.000 | Rp | 241.428.000 |
| 107 | LAMPIHONG | PIMPING | Rp | 592.869.000 | Rp | 355.721.400 | Rp | 237.147.600 |
| 108 | LAMPIHONG | HILIR PASAR | Rp | 585.832.000 | Rp | 351.499.200 | Rp | 234.332.800 |
| 109 | LAMPIHONG | TELUK KARYA | Rp | 585.817.000 | Rp | 351.490.200 | Rp | 234.326.800 |
| 110 | LAMPIHONG | PUPUYUAN | Rp | 603.242.000 | Rp | 361.945.200 | Rp | 241.296.800 |
| 111 | LAMPIHONG | SUNGAI AWANG | Rp | 592.096.000 | Rp | 355.257.600 | Rp | 236.838.400 |
| 112 | LAMPIHONG | KANDANG JAYA | Rp | 600.903.000 | Rp | 360.541.800 | Rp | 240.361.200 |

| | | | | | | | | |
|-----|------------------|--------------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|
| 113 | LAMPIHONG | MUNDAR | Rp | 601.046.000 | Rp | 360.627.600 | Rp | 240.418.400 |
| 114 | PARINGIN | BALANG | Rp | 581.466.000 | Rp | 348.879.600 | Rp | 232.586.400 |
| 115 | PARINGIN | KALAHIAN | Rp | 591.846.000 | Rp | 355.107.600 | Rp | 236.738.400 |
| 116 | PARINGIN | LASUNG BATU | Rp | 607.663.000 | Rp | 364.597.800 | Rp | 243.065.200 |
| 117 | PARINGIN | PARAN | Rp | 581.208.000 | Rp | 348.724.800 | Rp | 232.483.200 |
| 118 | PARINGIN | LAYAP | Rp | 585.181.000 | Rp | 351.108.600 | Rp | 234.072.400 |
| 119 | PARINGIN | MURUNG ILUNG | Rp | 588.261.000 | Rp | 352.956.600 | Rp | 235.304.400 |
| 120 | PARINGIN | MANGKAYAHU | Rp | 581.969.000 | Rp | 349.181.400 | Rp | 232.787.600 |
| 121 | PARINGIN | LOK BATUNG | Rp | 593.886.000 | Rp | 356.331.600 | Rp | 237.554.400 |
| 122 | PARINGIN | LAMIDA BAWAH | Rp | 582.470.000 | Rp | 349.482.000 | Rp | 232.988.000 |
| 123 | PARINGIN | DAHAI | Rp | 595.432.000 | Rp | 357.259.200 | Rp | 238.172.800 |
| 124 | PARINGIN | HUJAN MAS | Rp | 590.746.000 | Rp | 354.447.600 | Rp | 236.298.400 |
| 125 | PARINGIN | BABYAU | Rp | 590.716.000 | Rp | 354.429.600 | Rp | 236.286.400 |
| 126 | PARINGIN | BALIDA | Rp | 593.706.000 | Rp | 356.223.600 | Rp | 237.482.400 |
| 127 | PARINGIN | SUNGGAI KETAPI | Rp | 594.131.000 | Rp | 356.478.600 | Rp | 237.652.400 |
| 128 | PARINGIN SELATAN | BARUH BAHINU LUAR | Rp | 583.937.000 | Rp | 350.362.200 | Rp | 233.574.800 |
| 129 | PARINGIN SELATAN | INAN | Rp | 586.684.000 | Rp | 352.010.400 | Rp | 234.673.600 |
| 130 | PARINGIN SELATAN | BARUH BAHINU DALAM | Rp | 585.564.000 | Rp | 351.338.400 | Rp | 234.225.600 |
| 131 | PARINGIN SELATAN | PANGGUNG | Rp | 584.652.000 | Rp | 350.791.200 | Rp | 233.860.800 |
| 132 | PARINGIN SELATAN | GALUMBANG | Rp | 590.576.000 | Rp | 354.345.600 | Rp | 236.230.400 |
| 133 | PARINGIN SELATAN | HALUBAU | Rp | 604.976.000 | Rp | 362.985.600 | Rp | 241.990.400 |
| 134 | PARINGIN SELATAN | BINJAI | Rp | 588.040.000 | Rp | 352.824.000 | Rp | 235.216.000 |
| 135 | PARINGIN SELATAN | MURUNG ABUIN | Rp | 585.677.000 | Rp | 351.406.200 | Rp | 234.270.800 |
| 136 | PARINGIN SELATAN | BUNGIN | Rp | 586.899.000 | Rp | 352.139.400 | Rp | 234.759.600 |
| 137 | PARINGIN SELATAN | MARADAP | Rp | 584.291.000 | Rp | 350.574.600 | Rp | 233.716.400 |
| 138 | PARINGIN SELATAN | HALUBAU UTARA | Rp | 586.705.000 | Rp | 352.023.000 | Rp | 234.682.000 |
| 139 | PARINGIN SELATAN | MURUNG JAMBU | Rp | 591.879.000 | Rp | 355.127.400 | Rp | 236.751.600 |
| 140 | PARINGIN SELATAN | TELAGA PURUN | Rp | 588.064.000 | Rp | 352.838.400 | Rp | 235.225.600 |
| 141 | PARINGIN SELATAN | LINGSIR | Rp | 601.700.000 | Rp | 361.020.000 | Rp | 240.680.000 |
| 142 | PARINGIN SELATAN | TARANGAN | Rp | 582.206.000 | Rp | 349.323.600 | Rp | 232.882.400 |
| 143 | TEBING TINGGI | DAYAK PITAP | Rp | 613.211.000 | Rp | 367.926.600 | Rp | 245.284.400 |
| 144 | TEBING TINGGI | TEBING TINGGI | Rp | 599.669.000 | Rp | 359.801.400 | Rp | 239.867.600 |

| | | | | | | | | |
|-----|---------------|-----------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|
| 145 | TEBING TINGGI | SUNGSUM | Rp | 597.372.000 | Rp | 358.423.200 | Rp | 238.948.800 |
| 146 | TEBING TINGGI | JU'UH | Rp | 599.577.000 | Rp | 359.746.200 | Rp | 239.830.800 |
| 147 | TEBING TINGGI | MAYANAU | Rp | 602.745.000 | Rp | 361.647.000 | Rp | 241.098.000 |
| 148 | TEBING TINGGI | SIMPANG BUMBUAN | Rp | 593.446.000 | Rp | 356.067.600 | Rp | 237.378.400 |
| 149 | TEBING TINGGI | AUH | Rp | 591.179.000 | Rp | 354.707.400 | Rp | 236.471.600 |
| 150 | TEBING TINGGI | GUNUNG BATU | Rp | 595.835.000 | Rp | 357.501.000 | Rp | 238.334.000 |
| 151 | TEBING TINGGI | LANGKAP | Rp | 600.082.000 | Rp | 360.049.200 | Rp | 240.032.800 |
| 152 | TEBING TINGGI | SIMPANG NADONG | Rp | 597.132.000 | Rp | 358.279.200 | Rp | 238.852.800 |
| 153 | TEBING TINGGI | AJUNG | Rp | 617.102.000 | Rp | 370.261.200 | Rp | 246.840.800 |
| 154 | TEBING TINGGI | KAMBIYAIN | Rp | 609.136.000 | Rp | 365.481.600 | Rp | 243.654.400 |
| | | JUMLAH | Rp | 92.090.791.000 | Rp | 55.254.474.600 | Rp | 36.836.316.400 |

BUPATI BALANGAN,

Ttd

H. ANSHARUDDIN